

Peran Koperasi Merah Putih Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa

Diana Dwi Putri^{1*}, Hendra Riofita²

¹Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Ekonomi

Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau

Email : dianadwiputri973@gmail.com¹ , hendrariofita@yahoo.com²

*Penulis Korespondensi: dianadwiputri973@gmail.com

Abstract. *This study aims to examine the role of the Merah Putih Village Cooperative (KDMP) in strengthening the village economy, using the lens of good governance and social capital. This study uses a qualitative method with a library research approach, referring to academic journals, books, and government policy documents as sources of information. The research shows that KDMP plays a significant role in improving the welfare of village communities by strengthening productive businesses, expanding access to capital, creating job opportunities, and developing local economic potential. The application of good governance principles such as transparency, accountability, and community participation is a crucial factor in the successful management of the cooperative. In addition, social capital such as mutual assistance, trust, and community collaboration also contribute to the sustainability of the village cooperative. However, the implementation of KDMP still has a number of challenges, including a shortage of human resources, limited cooperative management, and low digital literacy. Therefore, government support and capacity building of cooperative managers are crucial for KDMP to function as a tool for sustainable village economic development.*

Keywords: *Red and White Village Cooperative; economic empowerment' good governance; social capital; village development.*

Abstrak. *Studi ini menyelidiki peran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa, dengan menggunakan lensa tata kelola yang baik dan modal sosial. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian pustaka, yang merujuk pada jurnal akademik, buku, dan dokumen kebijakan pemerintah sebagai sumber informasinya. Penelitian menunjukkan bahwa KDMP berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan usaha produktif, perluasan akses modal, penciptaan kesempatan kerja, dan pengembangan potensi ekonomi lokal. Penerapan prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan koperasi. Di samping itu, modal sosial seperti saling bantu, kepercayaan, dan kolaborasi masyarakat juga berkontribusi pada keberlangsungan koperasi desa. Namun, pelaksanaan KDMP masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan dalam kapasitas sumber daya manusia, manajemen koperasi yang terbatas, serta rendahnya literasi digital. Untuk itu, dukungan dari pemerintah dan peningkatan kapasitas pengelola koperasi sangat penting agar KDMP dapat berfungsi sebagai alat pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan.*

Kata kunci: *Koperasi Desa Merah Putih, pemberdayaan ekonomi, good governance, modal sosial, pembangunan desa.*

1. LATAR BELAKANG

Problem struktural adalah perbedaan ekonomi yang ada antara daerah perkotaan dan pedesaan menjadi tantangan besar dalam pembangunan nasional Indonesia. Disparitas ini tercermin dari rendahnya tingkat pendapatan masyarakat desa, terbatasnya akses ke infrastruktur yang buruk dan kelemahan dalam kapasitas sumber

daya manusia serta minimnya akses masyarakat desa terhadap pasar dan teknologi modern. Beberapa studi menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara desa dan kota adalah masalah struktural yang diakibatkan oleh kurangnya investasi, pelayanan publik yang kurang optimal, serta akses terbatas masyarakat desa kepada teknologi dan informasi. (Syafrizal et al., 2025). Situasi ini memicu pembentukan berbagai kebijakan penguatan ekonomi desa, di antaranya adalah program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Sebagai institusi ekonomi berbasis komunitas, koperasi telah menunjukkan perannya yang signifikan dalam sejarah ekonomi Indonesia. Konsep gotong royong dan kekeluargaan yang menjadi dasar koperasi sangat sejalan dengan sifat sosial masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Menurut informasi dari Kementerian Koperasi dan UKM, di tahun 2021 terdapat 127.846 koperasi yang aktif dengan jumlah anggota lebih dari 27 juta, modal mencapai Rp196,27 triliun dan aset senilai Rp250,98 triliun (Pakabu et al., 2025). Angka ini menegaskan potensi besar koperasi sebagai instrumen ekonomi berbasis masyarakat yang dapat dioptimalkan.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, KDMP secara resmi diluncurkan dengan tujuan untuk mempercepat pendirian koperasi di seluruh desa dan kelurahan Indonesia, menargetkan awalnya sebanyak 80.000 unit koperasi. Program ini dirancang sebagai respons atas kegagalan relatif program-program pemberdayaan ekonomi desa sebelumnya, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang kerap menemui hambatan tata kelola, minim partisipasi masyarakat, dan belum optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal (Saputri et al., 2025). Pada bulan Mei 2025, lebih dari 16.734 desa atau kelurahan telah dibentuk KDMP di berbagai wilayah Indonesia.

Riofita (2022) menekankan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan melalui program pemberdayaan digital adalah kunci untuk meningkatkan performa organisasi ekonomi rakyat di zaman modern. Selanjutnya, Riofita (2024) mengungkapkan bahwa persepsi terhadap peluang dan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan risiko adalah faktor kunci dalam keputusan mereka untuk berpartisipasi dan merekomendasikan institusi keuangan komunitas kepada orang lain temuan yang sangat berarti untuk perancangan program KDMP. Kajian teranyar Riofita (2025)

mengenai pembayaran digital syariah juga menekankan bahwa prinsip-prinsip kewirausahaan syariah dapat meningkatkan kepercayaan dan keputusan konsumen Muslim dalam membeli produk dari UMKM, sejalan dengan semangat koperasi berbasis komunitas.

Namun, penelitian tersebut masih berfokus pada kajian tentang Koperasi Desa Merah Putih masih tergolong minim, khususnya yang mempelajari kontribusinya dalam memperkuat ekonomi masyarakat desa melalui sudut pandang good governance dan modal sosial.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada Analisis integratif tentang Koperasi Desa Merah Putih sebagai alat kebijakan ekonomi desa yang diteliti melalui lensa good governance, modal sosial, dan pengembangan ekonomi lokal secara bersamaan. Studi ini juga meneliti KDMP sebagai program strategis nasional setelah diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang masih tergolong baru dan belum banyak dibahas dalam studi akademik.

Beberapa studi sebelumnya lebih fokus pada koperasi desa secara umum, BUMDes, atau pemberdayaan ekonomi masyarakat di pedesaan. Namun, penelitian tentang Partnership for Red Villages sebagai inisiatif strategis di tingkat nasional yang dihubungkan dengan sudut pandang tata kelola yang baik, modal sosial, dan peningkatan ekonomi lokal masih sangat minim. Di samping itu, penelitian yang mendalami bagaimana KDMP bisa menjadi alat untuk memperkuat ekonomi desa secara berkelanjutan di tengah tantangan dalam pengelolaan dan kapasitas kelembagaan desa masih tergolong sedikit. Oleh sebab itu, penelitian ini hadir sebagai upaya untuk menjembatani kekurangan tersebut melalui analisis menyeluruh terhadap peran KDMP dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Desa

Pemberdayaan ekonomi desa adalah proses memperkuat kapasitas dan kemandirian masyarakat desa dalam mengelola sumber daya ekonomi secara produktif dan berkelanjutan. Ide ini menekankan pada penguasaan aset produksi,

akses ke modal dan pasar, serta pengambilan keputusan ekonomi yang mencakup semua kalangan. Menurut pandangan pengembangan berbasis komunitas, pemberdayaan terjadi ketika masyarakat secara independen memperoleh akses kepada sumber daya, informasi, dan peluang usaha (Syafrizal et al., 2025). Dalam konteks ini, koperasi berfungsi sebagai sarana kolektif yang memberi kesempatan kepada masyarakat desa untuk memaksimalkan potensi lokal.

Konsep Pembangunan Ekonomi Lokal (LED) menekankan bahwa pengembangan ekonomi desa membutuhkan pemanfaatan potensi lokal, kerja sama antara pihak-pihak yang berkepentingan, serta inovasi dalam pengembangan usaha masyarakat. Suryana (2021) menekankan bahwa koperasi yang dikelola dengan profesionalisme dapat berfungsi sebagai pendorong ekonomi efektif di tingkat desa, terutama melalui pengelolaan sumber daya alam dan kegiatan usaha produktif yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan anggotanya. Perubahan struktur ekonomi desa dari keadaan subsisten ke arah komersial dapat direalisasikan melalui peningkatan nilai tambah produk pedesaan serta penguatan lembaga ekonomi.

2.2. Koperasi Desa Merah Putih sebagai Instrumen Kebijakan

Program pemerintah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertujuan mendirikan entitas bisnis berbasis komunitas di tingkat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip kolaborasi. Koperasi ini menyediakan berbagai layanan seperti simpan pinjam, apotek, dan klinik desa, toko kebutuhan sehari-hari, penyimpanan dingin, dan logistik. Dukungan pendanaan dari pemerintah dengan bunga rendah berkisar antara 2–6% turut menyokong operasionalnya. Program ini ditempatkan bukan hanya sebagai entitas komersial, tetapi juga sebagai gerakan sosial yang bertujuan untuk mengonsolidasikan kepentingan ekonomi anggotanya guna memperkuat posisi tawar mereka di pasar. (Syafrizal et al., 2025).

KDMP, seperti yang dijelaskan oleh Saputri et al. (2025), sejalan dengan tiga pilar Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran. Ini mencakup dorongan untuk kemandirian nasional melalui ketahanan pangan berkelanjutan, pengembangan industri agro-maritim berdasar partisipasi koperasi, dan upaya pembangunan ekonomi nasional yang merata dengan memulai dari tingkat desa. Riofita (2025) menegaskan bahwa nilai-nilai kewirausahaan syariah yang berfokus pada keadilan, transparansi dan

keberlanjutan sejalan dengan prinsip koperasi. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai tersebut dalam manajemen KDMP dapat memperkuat legitimasi dan membangun kepercayaan di antara para anggotanya.

2.3. Good Governance dan Modal Sosial dalam Koperasi

Menurut UNDP, prinsip good governance meliputi partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan responsivitas. Teori ini, dalam konteks desa, menekankan pentingnya pemberdayaan komunitas serta penguatan kapasitas lembaga lokal. Dewi dan Pratama (2021) menemukan bahwa masalah transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor penghambat signifikan dalam pengelolaan koperasi di Indonesia, sehingga penguatan sistem pelaporan keuangan dan mekanisme audit internal menjadi prioritas utama.

Keterlibatan sosial memiliki peranan yang sangat penting dalam pendirian dan kelangsungan koperasi. Modal sosial melibatkan kepercayaan, jaringan sosial, dan norma yang mendukung kolaborasi demi keuntungan bersama. Dalam penelitian mereka mengenai modal sosial dan keberlanjutan koperasi desa, Hidayati dan Pramono (2021) menemukan bahwa aspek budaya seperti semangat gotong royong, musyawarah, dan kepemimpinan lokal secara signifikan dapat memperkuat posisi koperasi serta meningkatkan partisipasi anggota. Riofita (2024) menegaskan bahwa persepsi terhadap peluang dan kemampuan dalam mengendalikan risiko yang dirasakan oleh masyarakat adalah faktor kunci dalam keputusan mereka untuk berpartisipasi serta merekomendasikan lembaga keuangan komunitas kepada pihak ketiga.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis berbagai konsep, teori, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan peran Koperasi Desa Merah Putih dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber ilmiah, seperti jurnal nasional dan internasional, buku, artikel ilmiah, dokumen kebijakan pemerintah, serta publikasi resmi yang relevan dengan topik penelitian.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menelaah literatur yang relevan dengan pengembangan koperasi

desa, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan ekonomi lokal. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan relevansi topik, kualitas sumber ilmiah, serta kesesuaian dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan, kami mendapatkan pemahaman yang menyeluruh mengenai kontribusi Koperasi Desa Merah Putih dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa.

Tabel 1 : Dimensi dan Temuan Analisis Koperasi Merah Putih

No	Dimensi Analisis	Temuan Penelitian
1	Pemberdayaan Ekonomi	Membuka akses modal, menciptakan lapangan kerja, menstabilkan harga dan mengurangi dominasi tengkulak
2	Tata Kelola (Good Governance)	Transparansi keuangan, akuntabilitas kepada anggota, partisipasi publik, dan efektifitas modal usaha
3	Modal Sosial	Gotong royong, musyawarah akad, dan kepercayaan tokoh lokal memperkuat legitimasi dan keberlanjutan koperasi
4	Tantangan Utama	Rendahnya kapasitas manajerial tumpang tindih regulasi BUMDEs, keterbatasan modal dan ketergantungan pusat
5	Rekomendasikan	Pelatihan SDM ,digitalisasi koperasi, pendampingan perguruan tinggi, harmonisasi regulasi, dan adaptasi kebijakan lokal

Sumber: Hasil Sintesis Literatur Peneliti (2025)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Peran Strategis KDMP dalam Pemberdayaan Ekonomi Desa

Koperasi Desa Merah Putih memainkan peran penting yang meliputi berbagai aspek pemberdayaan ekonomi di tingkat desa. Pertama, koperasi berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan akses ke peluang ekonomi yang lebih besar. Dengan unit usaha kredit dan simpan pinjam, toko kebutuhan sehari-hari, apotek, klinik desa, dan fasilitas penyimpanan dingin, KDMP memberikan kesempatan bagi masyarakat pedesaan untuk menikmati layanan ekonomi yang sebelumnya hanya dapat ditemukan di kota. Kedua, koperasi berperan dalam menciptakan pekerjaan baru di sektor produktif desa, menurunkan tingkat pengangguran,

dan mendorong perkembangan wirausaha yang didasarkan pada potensi lokal (Saputri et al., 2025).

Ketiga, KDMP berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi hegemoni tengkulak dan memperpendek jalur distribusi komoditas pertanian. Syafrizal et al. (2025) menjelaskan bahwa kehadiran koperasi menghasilkan kekuatan penyeimbang kekuatan penyeimbang yang mendorong pasar untuk menetapkan harga yang lebih seimbang bagi petani dan produsen desa. Menurut teori Struktur-Perilaku-Kinerja (SCP), struktur pasar yang sebelumnya didominasi oleh tengkulak akan bertransformasi menjadi lebih kompetitif dan adil ketika koperasi muncul sebagai kekuatan penyeimbang. Koperasi juga dapat berperan sebagai penggerak cepat, penggabung, dan pengumpul bagi pelaku UMKM di desa.

Keempat, KDMP memiliki fungsi strategis dalam menstabilkan harga kebutuhan pokok di tingkat konsumen sekaligus meningkatkan nilai jual hasil pertanian di tingkat produsen, yang pada akhirnya meningkatkan nilai tukar petani (NTP) sebagai indikator kesejahteraan petani. Dalam studi yang dilakukan oleh Riofita (2024), ditekankan bahwa pengelolaan risiko dan peluang secara sistematis merupakan elemen penting untuk kelangsungan lembaga keuangan dan ekonomi berbasis komunitas. Siregar et al. (2024) dalam analisis KSPPS BMT Berkah Madani juga menunjukkan bahwa koperasi berbasis syariah mampu meningkatkan kapasitas ekonomi anggota secara nyata melalui pembiayaan produktif dan pendampingan usaha yang berkelanjutan.

4.2. Tata Kelola (*Good Governance*) Koperasi Desa Merah Putih

Dari sudut pandang tata kelola yang baik, pelaksanaan KDMP memerlukan fokus yang mendalam pada empat indikator kunci. Pertama-tama, keterlibatan masyarakat adalah faktor penentu kesuksesan program. Partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan dan pengelolaan koperasi, mulai dari tahap musyawarah desa hingga keputusan operasional, adalah kunci untuk membangun rasa kepemilikan dan menjamin kesesuaian program dengan kebutuhan lokal. KDMP dirancang dengan mengutamakan musyawarah desa sebagai mekanisme utama dalam menentukan model pembentukan dan jenis unit usaha koperasi, seperti yang ditegaskan oleh Saputri et al. (2025).

Kedua, transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan adalah syarat penting untuk membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan. Ketiga,

akuntabilitas menjamin bahwa setiap kegiatan koperasi dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan hukum kepada semua pihak yang berkepentingan. Dewi dan Pratama (2021) menemukan bahwa masalah transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor penghambat signifikan dalam pengelolaan koperasi di Indonesia, sehingga penguatan sistem pelaporan keuangan dan mekanisme audit internal menjadi prioritas utama. Keempat, keberkesanan memerlukan penerapan model koperasi yang sesuai dengan ciri-ciri sosio-ekonomi masyarakat setempat.

Dalam studi mereka di Kabupaten Manokwari Selatan, Pakabu dan rekan (2025) menemukan bahwa meskipun tingkat karena partisipasi masyarakat yang tinggi, mereka kurang memahami prinsip dan keuntungan koperasi.. Kurangnya literasi kelembagaan menyebabkan partisipasi masyarakat hanya bersifat fisik dalam proses sosialisasi, bukan sebagai partisipasi substansial dalam pengambilan keputusan. Riofita (2022) menekankan bahwa program pemberdayaan digital yang terencana dapat secara substansial memperkuat kapasitas institusi dan mendorong keterlibatan aktif anggota dalam organisasi ekonomi berbasis komunitas.

4.3. Peran Modal Sosial dalam Penguatan Koperasi

Modal sosial adalah aset intangible yang sangat berharga untuk pengembangan koperasi di desa. Nilai gotong royong, budaya musyawarah, serta kepercayaan kepada tokoh lokal adalah dasar kultural yang dapat memperkuat proses pembentukan dan kesinambungan koperasi dalam masyarakat pedesaan Indonesia. Pakabu et al. (2025) mengungkapkan bahwa kepala desa dan tokoh adat mempunyai pengaruh sosial yang besar dalam mendorong masyarakat untuk bergabung dengan koperasi, sedangkan tokoh perempuan dan pemuda berperan sebagai penggerak utama partisipasi komunitas di lapangan.

Hidayati dan Pramono (2021) menekankan bahwa adanya modal sosial yang kuat terbukti dapat meningkatkan partisipasi anggotanya, memperkuat kohesi organisasi, serta mendorong keberlangsungan lembaga koperasi dalam jangka panjang. Riofita (2022) menegaskan bahwa program pemberdayaan yang menggabungkan modal sosial lokal dengan kemampuan digital kelembagaan akan memberikan kinerja organisasi yang lebih tangguh dan berkelanjutan, relevan untuk pengembangan KDMP.

Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa modal sosial yang terlalu bergantung pada figur otoritas tertentu dapat menimbulkan risiko politisasi program, konsentrasi kekuasaan, dan kerentanan terhadap konflik kepentingan. Oleh karenanya, pengembangan modal sosial harus diimbangi dengan penciptaan sistem manajemen formal yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Rahman dan Fitriani (2022) menekankan bahwa kontribusi pemerintah desa dalam memperkuat lembaga ekonomi desa melalui koperasi adalah kunci sukses transformasi modal sosial menjadi kekuatan institusional yang berkelanjutan.

4.4. Peluang dan Tantangan Implementasi KDMP

Koperasi Desa Merah Putih mempunyai berbagai peluang strategis yang dapat dimaksimalkan. Pertama, akses internet yang semakin terbuka di daerah pedesaan memberikan kesempatan untuk mendigitalisasi ekonomi koperasi. Sebagai pengumpul produk masyarakat dan memasarkan melalui platform digital, koperasi bisa berfungsi sebagai agregator yang memangkas rantai distribusi yang panjang, yang selama ini merugikan para petani (Syafrizal et al., 2025). Kedua, dukungan kebijakan pemerintah yang kuat, seperti distribusi Dana Desa dan penyediaan akses kredit dengan bunga rendah, menciptakan dasar finansial yang kondusif. Ketiga, kolaborasi KDMP dengan program pembangunan desa lainnya dapat memperbesar dampak pemberdayaan secara eksponensial.

Di sisi lain, implementasi KDMP menghadapi sejumlah tantangan serius. Tantangan pertama adalah rendahnya kapasitas manajerial pengurus koperasi di tingkat desa. Kurangnya profesionalisme pengurus yang sering kali tidak memiliki latar belakang di bidang manajemen bisnis atau keuangan mengakibatkan kinerja koperasi yang lambat dan kurang inovatif (Syafrizal et al., 2025). Kedua, risiko adanya tumpang tindih regulasi dan fungsi antara KDMP dan BUMDes dapat menyebabkan kebingungan bagi perangkat desa. Saputri et al. (2025) merekomendasikan agar pemerintah segera memastikan harmonisasi regulasi antara koperasi desa dan entitas desa lainnya untuk menghindari kompetisi tidak sehat.

Pakabu et al. (2025) mengungkapkan di Papua Barat bahwa ada perbedaan mencolok antara kebijakan yang ditetapkan secara terpusat oleh pemerintah dan keadaan sesungguhnya di lapangan, khususnya terkait dengan persyaratan jumlah anggota

minimum dan kelengkapan dokumen administratif. Hal ini menunjukkan perlunya fleksibilitas dan adaptasi kebijakan teknis sesuai konteks sosial-budaya masyarakat di berbagai daerah. Rahman dan Yuliana (2022) menyoroti bahwa tantangan struktural yang perlu diselesaikan meliputi kelemahan dalam administrasi institusional dan ketidaksesuaian antara kebijakan teknis dan situasi lokal, yang memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih responsif dan adaptatif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kami menyimpulkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) memiliki posisi penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat desa dengan cara memperkuat usaha produktif, memperluas akses pendanaan, menciptakan kesempatan kerja, serta mengembangkan potensi ekonomi lokal. KDMP tidak hanya berperan sebagai institusi ekonomi, tetapi juga sebagai media untuk memperkuat aspek sosial masyarakat dengan mengedepankan prinsip gotong royong, partisipasi, dan kolaborasi. Penerapan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sangat berpengaruh dalam mendukung keberhasilan pengelolaan koperasi. Selain itu, keberadaan modal sosial seperti kepercayaan dan solidaritas dari masyarakat desa juga memperkuat kelangsungan program koperasi. Namun demikian, KDMP masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan manajemen koperasi, minimnya literasi digital, dan lemahnya pengawasan kelembagaan. Untuk itu, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pengelola koperasi agar KDMP dapat tumbuh secara profesional dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan ekonomi desa di Indonesia. Diharapkan pemerintah dapat memperkuat pembinaan dan pendampingan kepada pengelola Koperasi Desa Merah Putih dengan pelatihan dalam manajemen, pengelolaan finansial, serta digitalisasi koperasi untuk meningkatkan profesionalisme dan efektivitas pengelolaan koperasi. Selain itu, pengelola koperasi harus secara konsisten mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi anggota guna memperkuat kepercayaan publik terhadap koperasi. Diharapkan pula, masyarakat desa akan lebih berpartisipasi secara aktif dalam aktivitas koperasi, sehingga KDMP dapat tumbuh sebagai lembaga ekonomi komunitas yang mampu meningkatkan kesejahteraan kolektif. Untuk mendapatkan data empiris yang lebih komprehensif tentang efektivitas KDMP dalam

meningkatkan ekonomi desa di berbagai wilayah Indonesia, disarankan agar penelitian selanjutnya mencakup studi lapangan secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, N. K., & Pratama, I. G. (2021). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 24(1), 45–56. <https://doi.org/10.22225/jeb.24.1.2021.45-56>
- Effendi, T. N. (2016). Budaya gotong royong masyarakat dalam perubahan sosial saat ini. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.22146/jps.v2i1.23403>
- Hidayati, R., & Pramono, A. (2021). Modal sosial dan keberlanjutan koperasi desa. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 9(2), 112–124.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2025). *Petunjuk pelaksanaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih*. Kemenkop UKM RI.
- Pakabu, D. V. L., Sabandar, S. Y., & Pasae, Y. (2025). Analisis pembentukan Koperasi Desa Merah Putih: Studi kasus pemberdayaan ekonomi masyarakat kampung di Kabupaten Manokwari Selatan. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistic*, 1(2), 287–292. <https://doi.org/10.1610/9m57ax15>
- Rahman, A., & Fitriani, D. (2022). Peran pemerintah desa dalam penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui koperasi. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 7(2), 145–156.
- Rahman, A., & Yuliana, N. (2022). Hambatan kelembagaan koperasi desa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 30(1), 33–44. <https://doi.org/10.14203/jep.30.1.2022.33-44>
- Republik Indonesia. (2025). *Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih*. Sekretariat Negara.
- Riofita, H. (2022). Developing digital empowerment programs to enhance the marketing performance of private Islamic higher education institutions. *Muslim Business and Economic Review*, 1(2), 257–280. <https://doi.org/10.56529/mber.v1i2.70>
- Riofita, H. (2024). Perceived opportunity and risk control role on willingness to recommend sharia fintech. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 13(2), 137–151. <https://doi.org/10.52813/jei.v13i2.353>
- Riofita, H. (2025). How shariah-compliant digital payments influence Muslim customer's purchase decision for micro, small and medium enterprises (MSMEs) products through sharia entrepreneurship principles. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2024-0202>
- Saputri, A. R., Subandriyo, & Hardiyan, M. I. (2025). Koperasi Desa Merah Putih dalam perspektif pembangunan desa dan tata kelola pemerintahan. *Journal of Society Bridge*, 3(2), 95–106. <https://doi.org/10.59012/jsb.v3i2.83>
- Siregar, G. B., Abidin, A. Z., Damayanti, N., Ulhaq, N. D., & Pratama, F. X. A. P. (2024). Peran koperasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat: Analisis

- KSPPS BMT Berkah Madani. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(5).
- Suryana, Y. (2021). Koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 36(2), 101–115. <https://doi.org/10.22146/jebi.63321>
- Suryani, D., & Pratama, A. (2021). Cooperative sustainability and challenges in Indonesia. *International Journal of Social Economics*, 48(12), 1742–1756. <https://doi.org/10.1108/IJSE-09-2020-0632>
- Syafrizal, R., Aulia, C., & Hasyim, L. W. (2025). Analisis peluang dan tantangan Koperasi Desa Merah Putih dalam pemberdayaan ekonomi desa. *Accounting Progress*, 4(2), 80–85. <https://doi.org/10.70021/ap.v4i2.287>